

ABSTRAK
ANALISIS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA
GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES
MENUJU DESA OTONOM
Oleh : Ariyandika Rahman
Dosen Pembimbing utama :
Dosen Pembimbing Pendamping :

BUMDes didasari akan kebutuhan dari peningkatan perekonomian masyarakat. BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki sebuah peranan penting dalam mewujudkan perekonomian masyarakat dan pemerintah desa di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tujuan dari adanya Badan Usaha Milik Desa juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 Menjelaskan bahwa BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli daerah.

Dari adanya Peraturan Daerah tersebut, penulis ingin meneliti lebih mendalam tentang bagaimana Peran dan tanggung jawab dari para pihak dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 guna meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui BUMDes menuju Desa Otonom. Dan bagaimana strategi pengembangan Badan usaha milik desa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pada saat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan BUMDes, pihak siapa yang akan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mengetahui beberapa strategi yang akan dijalankan oleh desa untuk mengembangkan BUMDes sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016.

Metode penelitian Skripsi skripsi ini adalah yuridis normatif dimana hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan dalam kaidah yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma. Sedangkan untuk pendekatan penelitian Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan yang dimaksudkan menganalisa suatu permasalahan berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan hukum positif.

Dalam rangka mendukung tujuan dari BUMDes yang didasari pada peraturan daerah Nomor 1 tahun 2016 ialah diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan BUMDes melalui kegiatan di berbagai unit usaha secara optimal dan terus menerus. Agar nantinya ada sistem keberlanjutan dari adanya kreatifitas dari pemerintah Desa dan Masyarakat desa yang dituangkan dalam Bada Usaha Milik Desa. Apabila nantinya BUMDes dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, maka masyarakat akan mandiri dalam meningkatkan perekonomiannya sehingga dikatakan sebagai desa otonom yang mengembangkan potensi dan kekayaan desa guna pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Namun berbanding terbalik dengan beberapa kenyataan yang ada, BUMDes dijadikan sebuah formalitas saja yang ketika didirikan tidak ada keberlanjutan yang seignifikan, lebih-lebih kepada pembangunan desa menjadi desa otonom. Setiap penyelewengan yang dilakukan oleh BUMDes menjadi hal yang tabu, yaitu siapa yang akan bertanggung jawab pada saat kejadian itu terjadi. Laporan pertanggung jawaban dari salah satu pihak hanya berhenti di Kepala Desa dan Kepala Desa hanya melaporkan kepada BPD di forum musyawarah desa. Tidak keterlibatan Pemerintah Daerah, mengakibatkan sulitnya proses hokum atau tindak pidana apabila terjadi kecurangan atau penyelewengan di BUMDes.

Kata Kunci : BUMDes, Pemerintah Desa, Masyarakat Desa



ABSTRACT
ANALYSIS OF REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2016
CONCERNING GUIDELINES ON PROCEDURES FOR THE FORMATION AND
MANAGEMENT OF A VILLAGE-OWNED BUSINESS ENTITY
TO IMPROVE THE COMMUNITY'S ECONOMY THROUGH BUMDES TOWARDS
AN AUTONOMOUS VILLAGE

By: Ariyandika Rahman
Main Supervisor:
Accompanying Supervisor:

BUMDes is based on the need to improve the community's economy. BUMDes is a village economic institution which has an important role in realizing the economy of the community and village government in Regional Regulation Number 1 of 2014. The purpose of having Village-Owned Enterprises is also regulated in Regional Regulation Number 1 of 2016 Article 3 Explains that BUMDes aims to improve village economy, Optimizing village assets so that they are useful for village welfare, increasing community efforts in managing village economic potential, developing business cooperation plans between villages or with third parties, creating opportunities and market networks that support residents' public service needs, opening up employment opportunities, increasing community welfare through improving public services, growth and equalization of the village economy and increasing village community income and local original income.

Based on these Regional Regulations, the author wants to examine in more depth the roles and responsibilities of the parties in implementing Regional Regulation Number 1 of 2016 in order to improve the Community Economy through BUMDes towards Autonomous Villages. And what is the development strategy for village-owned enterprises. This aims to find out when an error occurs in the implementation of BUMDes, who will be responsible and aims to find out several strategies that will be implemented by the village to develop BUMDes in accordance with the contents of Regional Regulation Number 1 of 2016.

The research method for this thesis Skripsi is normative juridical where law as a normative concept is law as a norm, both identified with justice which must be realized in rules which have been realized as explicit orders and which are positively formulated clearly to guarantee certainty and also in the form of norms. norm. Meanwhile, for the research approach in this research, the problem approach used in this research is the statutory approach, a statutory approach which is intended to analyze a problem based on applicable regulations in accordance with positive law.

In order to support the objectives of BUMDes which are based on regional regulation Number 1 of 2016, it is necessary to make efforts to improve and utilize BUMDes through activities in various business units optimally and continuously. So that in the future there will be a sustainable system from the creativity of the Village government and the village community which is outlined in the Village Owned Enterprise. If BUMDes is implemented in accordance with the applicable law, then the community will be independent in improving its economy so that it can be said to be an autonomous village that develops the potential and wealth of the village in order to empower the welfare of the community in the village.

However, in contrast to several existing realities, BUMDes is only used as a formality and when it is established there is no significant sustainability, especially regarding the development of villages into autonomous villages. Every fraud committed by BUMDes becomes a taboo matter, namely who will be responsible when the incident occurs. Accountability reports from one party only stop with the Village Head and the Village Head only reports to the BPD at the village deliberation forum. The lack of involvement of the Regional Government results in difficulties in legal proceedings or criminal acts if fraud or misappropriation occurs in BUMDes.

Keywords: BUMDes, Village Government, Village Community

